

Judul : Babak Baru yang Menjadi "Karpets Merah" untuk Rakyat
Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 13

REFORMA AGRARIA

Babak Baru yang Menjadi "Karpets Merah" untuk Rakyat

Selama ini, pendekatan hukum dalam penyelesaian konflik agraria masih sebatas pidana dan penjara. Padahal, konflik agraria merupakan konflik struktural yang penyelesaiannya dapat dilakukan tanpa ancaman penjara. Apalagi, selama ini petani, masyarakat adat, dan pejuang lingkungan justru menjadi korban kriminalisasi.

Berdasarkan data yang dirangkum dalam Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama 10 tahun (2014-2024) terdapat 2.841 orang dikriminalisasi, 1.054 orang mengalami kekerasan, 88 orang terbunuh, dan 79 orang tewas dalam penanganan konflik agraria.

Lalu, sepanjang 2025 sebanyak 404 orang dikriminalisasi, 312 orang mengalami kekerasan, 19 orang terbunuh, dan 1 orang tewas. KPA juga mencatat, dalam setahun terakhir, ada 147 kasus dugaan kriminalisasi di 11 provinsi terjadi.

Menurut Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika, selama ini penyelesaian konflik agraria hanya sebatas pidana penjara. Padahal, konflik agraria merupakan konflik struktural yang terjadi karena pertentangan klaim penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Sayangnya, korban dalam konflik ini selalu petani atau rakyat kecil.

"Bahkan, advokat dan para pejuang lingkungan juga ikut dikriminalisasi. Perspektif ke-

polisian, ini hanya sengketa lahan sehingga pendekatannya sangat legalistik dan dengan mudah memidanakan rakyat kecil. Ini harus berubah," tegas Dewi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Dewi menjelaskan, ada tiga poin utama yang disepakati dalam rapat tersebut. Pertama, DPR melalui Komisi III meminta Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri untuk mempercepat perubahan persepsi kepolisian terhadap konflik agraria dengan pendekatan yang lebih restoratif dan humanis.

Kedua, lanjut Dewi, Komisi III meminta Bareskrim dan semua kepolisian daerah untuk melakukan moratorium atau menangguhkan seluruh perkara pidana yang berkaitan dengan konflik struktural agraria, terutama di 147 kasus kriminalisasi di 11 provinsi. Poin ketiga, Komisi III berkomitmen untuk mendukung semua pihak dan mengawasi kinerja Kabinet Merah Putih dalam mendorong percepatan reforma agraria.

"Ini merupakan langkah perbaikan yang begitu positif sehingga harus didukung. Kami berharap, ke depan, tidak ada lagi kesalahan persepsi dalam melihat konflik agraria," kata Dewi.

Kepala Bareskrim Polri Komisar Jenderal Syahar Diantono, yang hadir dalam rapat itu, mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan supervisi



Seorang pengunjuk rasa mengenakan caping bertuliskan "Reforma Agraria Sejati" saat mengikuti aksi Hari Buruh di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

dan verifikasi terhadap 147 kasus di 11 provinsi sesuai dengan data KPA.

Hasilnya, Bareskrim menghentikan 5 kasus pada tahap penyelidikan atau SP2id. Lalu, sebanyak 3 kasus juga dihentikan pada tahap penyidikan lewat penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Selain itu, terdapat 10 kasus yang berpotensi bisa di-

selesaikan melalui mekanisme *restorative justice* (RJ).

"Ini mungkin dalam beberapa waktu ke depan, ada 10 kasus bisa terealisasi RJ," kata Syahar.

Syahar menambahkan, pihaknya menggelar analisis dan evaluasi bersama 12 direktur reserse Polda di beberapa wilayah yang menangani kasus-kasus tersebut.

"Arahan kami ke jajaran polda dan polres sangat jelas.

Penanganan sengketa lahan harus dilakukan secara humanis, cermat, dan berlandaskan kepada asas kemanusiaan yang adil," ujarnya.

Syahar berjanji, dalam penyelesaian konflik agraria, pihaknya memegang teguh prinsip keadilan yang berimbang, yaitu mendengar dari semua pihak secara langsung. "Kami secara proaktif juga memverifikasi dan pendataan menyeluruh yang berpijak dari data

yang disampaikan oleh rekan-rekan dari KPA," jelasnya.

Prolegnas

Pendekatan hukum terhadap konflik agraria akan jauh lebih baik jika RUU Reforma Agraria disahkan. Saat ini, untuk pertama kali, RUU Reforma Agraria masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Masuknya RUU Reforma Agraria dalam Prolegnas Prioritas 2026 itu disepakati dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD dalam rangka evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, di Jakarta, Senin (24/8).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah menilai penyelesaian konflik agraria perlu dipercepat. Dalam Rapat Koordinasi Perkembangan dan Penanganan Konflik Agraria di Jakarta, pada Selasa (11/8), menurut Dasco, penyelesaian konflik agraria membutuhkan dorongan dengan memperkuat kebijakan melalui penyusunan RUU Reforma Agraria.

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengatakan, RUU Reforma Agraria merupakan usulan DPR. Pihaknya masih akan mempelajari usulan tersebut. "Satu hal yang pasti, RUU ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik agraria," ujar Sul-

tan dalam pesan singkat kepada Kompas, Rabu petang.

Hal serupa juga disampaikan anggota DPD asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang. Menurut dia, tujuan dasar RUU Reforma Agraria adalah upaya untuk menata ulang penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

"Selain itu, RUU ini merupakan batu penjuru guna menetapkan dasar-dasar terciptanya keadilan, kepastian, kemanfaatan, kesejahteraan, serta kemakmuran rakyat," ujar Agustin.

DPD juga akan memantau dan mengawal perkembangan pembahasan RUU tersebut. Hal yang sama juga akan dilakukan KPA.

"Sudah terlalu lama kebijakan negara menjadi karpets merah bagi investor. Kini saatnya Reforma Agraria menjadi karpets merah bagi rakyat: petani kecil, penggarap, buruh tani, masyarakat adat, nelayan, perempuan petani, dan kelompok marginal di perkotaan," ucapnya.

RUU Reforma Agraria dan komitmen kepolisian dalam menangani konflik seperti napas segar dalam mewujudkan reforma agraria. Karena itu, dua hal itu tidak bisa dipandang sebagai produk politik semata, tetapi semangat baru untuk menyelesaikan konflik yang sudah membuat masyarakat menderita.

(DIONISIUS REYNALDO TRUWIBOWO)